

## Landasan Filosofis Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar

Frans Samuel<sup>1\*</sup>, Shely Cathrin<sup>2</sup>

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author. [franssamuel.2024@student.uny.ac.id](mailto:franssamuel.2024@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi landasan filosofis di balik setiap kebijakan kurikulum pendidikan dasar, (2) menganalisis faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada perubahan kebijakan kurikulum pendidikan dasar, dan (3) menjelaskan implikasi filosofis dari dinamika kebijakan kurikulum terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional di tingkat pendidikan dasar. Identifikasi masalah terkait dengan adanya instabilitas interpretasi filosofis dalam dialektika sejarah kurikulum yang menimbulkan masalah mengenai konsistensi landasan filosofis pendidikan dasar di tengah dinamika pergantian rezim, dominasi “prasangka” global terhadap kemandirian kebijakan lokal juga mendapatkan sorotan dan kesenjangan aplikasi (pedagogi) akibat fragmentasi makna kebijakan memunculkan paradoks pada level implikasi filosofis. Penelitian ini merupakan Studi Pustaka dengan pendekatan Hermeneutik Gadamer. Data primer penelitian diperoleh dari dokumen/teks kebijakan, yaitu Naskah Akademik dan Peraturan Menteri Pendidikan yang menjadi corpus analisis. Data sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan kritis digunakan sebagai konteks historis dan referensi interpretatif. Hasil penelitian memetakan secara jelas pergeseran dominasi landasan filosofis dalam kebijakan kurikulum pendidikan dasar, menunjukkan kontribusi faktor-faktor eksternal dalam memengaruhi perubahan kebijakan kurikulum pendidikan dasar, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan filsafat bagi pembuat kebijakan.

**Kata kunci:** landasan filosofis, dinamika kebijakan kurikulum, pendidikan dasar

### Abstract

*This study aims to: (1) identify the philosophical basis behind each basic education curriculum policy, (2) analyse external factors contributing to changes in basic education curriculum policy, and (3) explain the philosophical implications of curriculum policy dynamics on the achievement of national education goals at the basic education level. The identification of problem is related to the instability of philosophical interpretations in the dialectic history of the curriculum, which raises issues regarding the consistency of the philosophical basis of primary education amid the dynamics of regime change. The dominance of global “prejudice” against local policy independence is also highlighted, as well as the gap in application (pedagogy) due to the fragmentation of policy meanings, which creates a paradox at the level of philosophical implications. The primary research data was obtained from policy document/texts, namely Academic Manuscripts and Minister of Education Regulations, which became the corpus of analysis. Secondary data in the form of journals, books, and critical reports were used as historical context and interpretive references. The results of the study clearly map the shift in the dominance of philosophical foundations in basic education curriculum policy, showing the contribution of external factors in influencing changes in basic education curriculum policy, and can provide philosophy-based policy recommendations for policymakers.*

**Keywords:** *philosophical basis, curriculum policy dynamics, basic education*



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah modal terbesar dalam membangun suatu peradaban bangsa. Pendidikan sering dianggap hanya sebagai upaya membagikan ilmu (Saputri et al., 2023). Namun, pendidikan memiliki kompleksitas dalam proses, cara dan perbuatan mendidik. Salah satu aspek penting yang sangat memengaruhi adalah landasan filosofis kebijakan kurikulum.

Landasan pendidikan nasional Indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pokok-pokok yang terkandung di dalamnya antara lain:

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; Pemerintah mengusahakan dan mengatur satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan diatur oleh undang-undang; Negara memprioritaskan anggaran pendidikan dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Kartimi, 2021).

Senada dengan hal tersebut fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Ashidiqi et al., 2024).

Pendidikan secara hakiki sangat penting peranannya di dalam meningkatkan sumber daya manusia (Ashidiqi et al., 2024). Pendidikan ada tiga macam yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal (Ashidiqi et al., 2024). Pendidikan formal yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, menjadi tolok ukur dari proses pembentukan sumber daya manusia bangsa Indonesia. Penelitian ini akan memusatkan pembahasan di tingkat pendidikan dasar.

Perubahan kurikulum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Hal ini dibuktikan sebagaimana Fitri menyebutkan ada tiga faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan, yaitu: faktor pendekatan pembelajaran, faktor perubahan kurikulum, faktor kompetensi pendidik (Fitri, 2021). Kurikulum yang menjadi pijakan pendidik dalam mengajar akan menjadi kurang optimal apabila terus-menerus diganti (Fitri, 2021). Perubahan kurikulum memerlukan berbagai pertimbangan yang matang termasuk di dalamnya analisis kebutuhan dari setiap pemangku kebijakan serta dapat menjawab tantangan dari problematika pendidikan yang ada.

Setiawati menyebutkan beberapa faktor penyebab perubahan kurikulum antara lain, yaitu “(1) adanya perkembangan dan perubahan yang dinamis; (2) berkembangnya industri dan produksi serta teknologi; (3) orientasi politik dan praktik kenegaraan; (4) paradigma pendidikan yang berubah” (Setiawati, 2022). Alasan adanya pergantian kurikulum sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan (Setiyorini & Setiawan, 2023). Namun, paradigma politik juga menjadi determinan perubahan kurikulum di Indonesia (Alhamduddin, 2016). Acapkali kerangka kurikulum memiliki muatan-muatan politis, nilai ideologi maupun tujuan tertentu.

Perubahan kurikulum yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif bagi kemajuan bangsa perlu dipertimbangkan dalam empat landasan yang menjadi dasar pengembangannya, yaitu: filosofis, psikologis, historis dan sosiologis. Landasan filosofis sebagai landasan utama perlu mendapatkan perhatian sebagai upaya untuk memastikan setiap elemen yang meliputi: tujuan, isi atau materi, proses pembelajaran dan evaluasi dapat berfungsi dengan baik. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan (Kartimi, 2021). Adanya hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-

cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan (Kartimi, 2021). Hal ini menjadikan filsafat sebagai disiplin ilmu yang menjadi acuan bagi setiap kurikulum yang diterapkan.

Setiap kebijakan kurikulum yang ditetapkan memiliki landasan filosofis tertentu. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: mengidentifikasi landasan filosofis di balik setiap kebijakan kurikulum pendidikan dasar, menganalisis faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada perubahan kebijakan kurikulum pendidikan dasar, dan menjelaskan implikasi filosofis dari dinamika kebijakan kurikulum terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional di tingkat pendidikan dasar. Sujarwoto menegaskan bahwasanya kebijakan bersifat dinamis sehingga dalam fokus kajian kebijakan maka yang menjadi objek penelitiannya adalah keputusan yang dihasilkan oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini kurikulum nasional sebagai produk dari kebijakan pendidikan (Sujarwoto, 2020). Hal tersebut menetapkan kurikulum nasional berada di dalam dinamika kebijakan.

Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian namun juga bersifat menyeluruh. Herman mengatakan bahwasanya perubahan kurikulum yang bersifat sebagian tidak akan berdampak terhadap komponen lain di dalamnya (Herman et al., 2023). Hal sebaliknya terjadi dalam perubahan kurikulum yang bersifat menyeluruh, perubahan tersebut akan memengaruhi keseluruhan komponen di dalamnya (Herman et al., 2023). Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penelitian ini akan melakukan kajian dengan judul “Landasan Filosofis Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Studi Pustaka dengan pendekatan Hermeneutik Gadamer. Hermeneutik Gadamer memberikan tafsiran dan pemahaman teks sebagai suatu kebenaran yang kompleks berkaitan dengan totalitas pengalaman manusia di dunia (Collins et al., 2021). Data primer penelitian diperoleh dari dokumen/teks kebijakan, yaitu Naskah Akademik dan Peraturan Menteri Pendidikan yang menjadi corpus analisis. Data sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan kritis digunakan sebagai konteks historis dan referensi interpretatif.

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui tinjauan kepustakaan sehingga tidak ada rujukan tempat penelitian dengan dasar pertimbangan bahwasanya sumber data yang digunakan adalah teks-teks akademik kurikulum dalam rentang waktu 1994-2025. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *Peer Debriefing*, yaitu melakukan kalibrasi interpretasi hermeneutik melalui konsultasi dan diskusi intensif dengan pakar dan dosen pembimbing guna menghindari bias subjektivitas peneliti agar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang hendak dilihat oleh penulis yaitu bagaimana dinamika yang terjadi di dalam kebijakan kurikulum pendidikan dasar. Penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian pada bulan Desember 2025 – Juni 2026.

Pendekatan hermeneutik Hans-Georg Gadamer menguraikan data secara naratif berdasarkan naskah akademik dan regulasi kurikulum pendidikan dasar dari tahun 1994 hingga 2025. Penelitian ini mengoperasionalkan empat tahapan analisis hermeneutik Gadamer untuk membongkar landasan filosofis dibalik dokumen-dokumen kebijakan. Adapun empat tahapan analisis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Penerapan Prasangka Hermeneutika (*Vorurteil/ Pre-understanding*); (2) Mekanisme Lingkaran Hermeneutika (*Hermeneutic Circle*); (3) Peleburan Batas Subjek-Objek (*Fusi Horizon*); (4) Penyingkapan melalui Hermeneutika Dialektis. Jadi penelitian ini akan membedah setiap naskah akademik dan regulasi kurikulum yang ada menggunakan empat tahapan analisis di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan Dasar

Periode Kurikulum	Fokus Teks Kebijakan	Horizon Filosofis Dominan
Kurikulum 1994	Penguasaan materi / konten yang padat dan terpusat (sentralistik).	Esensialisme dan Perenialisme (Pendidikan sebagai transfer pengetahuan baku).

Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)	Pencapaian kompetensi dasar dan hasil belajar peserta didik secara individual.	Pragmatisme dan Progresivisme Awal (Pendidikan berorientasi pada hasil dan fungsionalitas).
Kurikulum 2006 (KTSP - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)	Otonomi sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai potensi daerah.	Eksistensialisme dan Rekonstruksi Sosial (Desentralisasi makna dan keberagaman lokal).
Kurikulum 2013	Keseimbangan antara sikap (spiritual/sosial), pengetahuan, dan keterampilan.	Idealisme dan Rekonstruksionisme (Pendidikan sebagai pembentuk karakter dan moral bangsa).
Kurikulum 2022 (Kurikulum Merdeka)	Fleksibilitas pembelajaran, materi esensial dan pemulihan <i>learning loss</i> .	Humanisme dan Eksistensialisme (Pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada siswa).
Kurikulum 2025	Disrupsi digital, pandemi Covid-19, dan tekanan kuat dari stagnasi skor PISA/OECD.	Pancasila direkonstruksi menjadi “Profil Pelajar Pancasila”. Ini adalah upaya fusi horizon tertinggi: mencoba mengawinkan karakter/identitas kelokalan dengan kompetensi global (kritis, kreatif, dan mandiri).

Berdasarkan hasil pemetaan data terdapat pergeseran *horizon* (cakrawala) makna dalam naskah akademik kurikulum rentang waktu 1994-2025. Hal tersebut dibuktikan dalam kurikulum 1994 setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) maka semua upaya pendidikan perlu disesuaikan dengan undang-undang tersebut (RI, 1993). Kurikulum 1994 adalah kurikulum pertama yang dirancang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu maka kurikulum 1994 diwujudkan dalam tiga dokumen, yaitu: Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum; Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP); dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.

Kurikulum 1994 tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai dokumen teknis pembelajaran melainkan sebagai produk pemahaman kolektif negara terhadap pendidikan dasar pada masa orde baru. Di dalam *Truth and Method*, Gadamer menyatakan bahwa pengaruh dan bias-bias pemahaman yang disebabkan oleh prasangka-prasangka dan otoritas tidak boleh dianggap remeh (Prasetyono, 2024). Pada dasarnya, prasangka-prasangka adalah kondisi yang sangat memengaruhi atau menentukan proses bagaimana pembuatan suatu putusan (Prasetyono, 2024). Begitupun, kurikulum 1994 dibentuk oleh prasangka-prasangka ideologis dan historis, antara lain: pendidikan diposisikan sebagai instrumen pembangunan dan penguatan ideologi negara, pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang objektif, baku dan dapat ditransfer secara linear dari guru ke siswa, dan negara menjadi penafsir utama makna pendidikan sementara sekolah dan guru berperan sebagai pelaksana.

Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir dalam konteks transisi besar sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi 1998. Perubahan paradigma politik dari sentralistik menuju desentralistik, serta tuntutan demokratisasi dan globalisasi menjadi horizon historis yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan kurikulum ini. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai alat transmisi pengetahuan negara kepada warga melainkan sebagai instrumen pemberdayaan individu agar memiliki kompetensi hidup (*life skills*) yang relevan dengan perubahan sosial dan ekonomi global. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merepresentasikan pergeseran mendasar dari pendekatan berbasis materi (*content-based curriculum*) menuju pendekatan berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*).

Namun, dalam kerangka pengaruh sejarah Gadamer menunjukkan bahwasanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tidak sepenuhnya memutus tradisi lama. Struktur mata pelajaran, peran

dominan negara dalam standar kompetensi serta budaya evaluasi sumatif masih menunjukkan kesinambungan dengan paradigma sebelumnya. Di satu sisi, KBK mengadopsi diskursus internasional tentang kompetensi abad ke-21 (*outcome-based education*) dan efisiensi sumber daya manusia. Sudut pandang berbeda yang perlu dipertimbangkan mengatakan bahwa implementasi KBK dihadapkan pada realitas lokal berupa kesiapan guru, disparitas daerah, serta budaya sekolah yang masih berorientasi pada ujian.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 lahir dalam konteks pasca-reformasi yang ditandai oleh desentralisasi pemerintahan dan pergeseran paradigma kebijakan publik dari sentralistik menuju otonomi daerah. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merefleksikan horizon zaman yang menekankan demokratisasi pendidikan, pemberdayaan satuan pendidikan, dan pengakuan terhadap keberagaman lokal. Oleh sebab itu, maka KTSP 2006 adalah teks kebijakan yang membawa prasangka (*prejudices*) positif terhadap otonomi, fleksibilitas, dan kontekstualitas pembelajaran.

KTSP 2006 menempatkan sejumlah prasangka filosofis membentuk struktur kebijakannya, antara lain mengasumsikan bahwa guru adalah subjek profesional yang mampu menyusun kurikulum operasional, mengembangkan silabus, dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pada *practical wisdom* (kebijaksanaan praktis) guru sebagai pelaku interpretasi kurikulum. KTSP berpijak pada keyakinan bahwa realitas pendidikan Indonesia bersifat plural dan tidak bisa diseragamkan secara nasional. Hal ini selaras dengan pandangan Gadamer bahwa makna selalu lahir dari situasi historis tertentu.

Ciri yang membedakan KTSP dari kurikulum sebelumnya adalah KTSP menyediakan standar isi dan standar kompetensi lulusan namun implementasinya diserahkan kepada satuan pendidikan. Disinilah terjadi proses hermeneutik: sekolah menafsirkan standar nasional, guru mengontekstualisasikan dalam RPP dan pembelajaran, peserta didik mengalami hasil interpretasi tersebut dalam praktik kelas. Proses ini menunjukkan bahwa makna kurikulum tidak pernah final melainkan selalu *in the making* sesuai dengan prinsip dialogis Gadamer. Hal ini juga yang menjadikan KTSP memiliki ciri kurikulum yang ideal untuk Indonesia sehingga dapat mencakup seluruh elemen terkait.

Kurikulum 2013 sangat dipengaruhi oleh wacana global mengenai pendidikan karakter, kompetensi abad ke-21, *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dan pendekatan saintifik. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan K-13 merupakan dialog antara tradisi pendidikan nasional dengan perkembangan paradigma pendidikan global. Pada saat yang sama, kurikulum 2013 berangkat dari horizon ideologis nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional. Menurut perspektif Gadamer, inilah yang disebut sebagai proses pemahaman yang otentik, yaitu ketika tradisi lama tidak ditolak tetapi direinterpretasi sesuai kebutuhan zaman.

Penyusunan kurikulum 2013 terdapat beberapa prasangka epistemologis yang memengaruhi arah kebijakan, antara lain: anggapan bahwa kurikulum sebelumnya terlalu menekankan aspek kognitif, keyakinan bahwa pendidikan Indonesia mengalami krisis karakter, pandangan bahwa pembelajaran harus lebih kontekstual dan tematik, asumsi bahwa guru perlu diarahkan dengan sistem yang lebih terstruktur. Prasangka-prasangka tersebut membentuk horizon berpikir para pembuat kebijakan yang kemudian diwujudkan dalam desain kurikulum 2013 seperti: penekanan pada kompetensi inti; integrasi sikap, pengetahuan dan keterampilan; pendekatan saintifik; dan penilaian autentik. Kurikulum 2013 tidak dapat dipahami hanya dari dokumen resminya tetapi juga dari praktik implementasinya di lapangan. Praktik yang dimaksud adalah terjadinya proses dialog hermeneutik antara: dokumen kurikulum, guru sebagai penafsir, siswa sebagai subjek didik, dan konteks sosial sekolah.

Kurikulum Merdeka muncul sebagai respons atas beberapa konteks historis penting seperti: kritik terhadap kurikulum 2013 yang dianggap terlalu padat kompetensi, kebutuhan penyederhanaan kurikulum, tantangan revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran. Prinsip “merdeka belajar” yang menjadi roh kurikulum ini sesungguhnya merupakan reinterpretasi filosofis atas gagasan pendidikan Ki Hadjar Dewantara tentang kemerdekaan berpikir dan kemandirian belajar. Kurikulum merdeka menempatkan sejumlah prasangka produktif yang

melandasi kebijakan ini, antara lain: keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi unik, pandangan bahwa pembelajaran tidak harus seragam, kepercayaan bahwa guru perlu diberikan otonomi pedagogis, anggapan bahwa kurikulum harus fleksibel dan kontekstual. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum merdeka dibangun atas asumsi filosofis bahwa keberagaman peserta didik menuntut keberagaman pendekatan pembelajaran.

Kurikulum Merdeka menunjukkan fusi horizon dalam beberapa aspek diantaranya pertemuan antara tradisi pendidikan nasional dengan tuntutan global, dialog antara pengalaman guru dengan kebutuhan peserta didik masa kini, integrasi nilai Pancasila dengan kompetensi abad 21. Implementasi kurikulum merdeka tidak dapat dipahami sebagai penerapan mekanis regulasi pemerintah semata tetapi sebagai proses interpretasi kreatif oleh para guru dan sekolah. Guru dalam perspektif Gadamer adalah “penafsir aktif” kurikulum. Modul ajar, capaian pembelajaran, dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan ruang hermeneutik tempat guru menafsirkan kebijakan sesuai dengan konteks lokalnya.

Berdasarkan analisis hermeneutik Gadamer dapat diungkap beberapa makna filosofis utama kurikulum merdeka diantaranya adalah kurikulum sebagai ruang dialogis, pemahaman kurikulum bersifat interpretatif, kebenaran kurikulum bersifat dinamis, dan pendidikan sebagai proses humanisasi. Ruang dialog antara guru, siswa, dan konteks sosial membuat setiap sekolah diberi kesempatan untuk menafsirkan kebijakan sesuai dengan karakteristiknya sehingga membuka kemungkinan perubahan berkelanjutan sesuai dengan dinamika zaman dengan ruh utama kurikulum merdeka yang menempatkan manusia sebagai subjek utama proses pemaknaan. Secara filosofis, kurikulum ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari positivistik-teknokratis menuju paradigma humanistik-interpretatif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kurikulum merdeka hanya dapat dipahami secara utuh apabila dilihat sebagai proses hermeneutik yang melibatkan fusi horizon antara pemerintah, guru dan peserta didik.

Kurikulum 2025 dapat dipahami sebagai teks kebijakan yang memuat cara pandang pemerintah tentang hakikat peserta didik, hakikat belajar, tujuan pendidikan, peran guru dan sekolah, posisi pendidikan dalam pembangunan nasional. Sudut pandang hermeneutik, kebijakan kurikulum tidak pernah lahir dalam ruang hampa melainkan selalu merupakan respon terhadap situasi sosial-historis tertentu. Kurikulum 2025 hadir dalam konteks disrupsi teknologi digital, tuntutan globalisasi, kebutuhan penguatan karakter kebangsaan, dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan pemahaman terhadap kurikulum 2025 harus dilakukan melalui proses dialog antara teks kebijakan dengan konteks historis yang menjadi latar belakangnya.

Kurikulum ini memiliki beberapa pra-pemahaman filosofis yang dapat diidentifikasi antara lain: kurikulum 2025 memandang peserta didik sebagai individu yang unik, subjek aktif pembelajaran, dan makhluk sosial yang harus berkembang secara holistik. Pandangan ini menunjukkan adanya orientasi konstruktivistik-humanistik yang kuat. Peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek transfer pengetahuan, melainkan sebagai subjek yang membangun makna melalui pengalaman belajar. Hal tersebut menjadikan kurikulum 2025 sebagai harapan baru bagi pendidikan dasar di Indonesia.

Secara ideologis, kurikulum 2025 tetap berpijak pada nilai-nilai pancasila, semangat kebhinekaan dan penguatan karakter kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum tidak hanya bersifat pedagogis melainkan juga politis-ideologis. Namun, yang membedakan adalah kurikulum 2025 tidak memberikan banyak ruang untuk politik mengambil bagian dalam penyusunannya sehingga dampak yang terjadi adalah pendanaan yang seharusnya dapat diperoleh lebih banyak menjadi semakin sedikit. Hal tersebut berakibat terhadap implementasi dari kebijakan kurikulum.

Pemerintah merancang kurikulum 2025 dengan horizon daya saing global, transformasi digital, penguatan karakter, efisiensi dan fleksibilitas pendidikan. Sudut pandang yang berbeda mengatakan guru sebagai pelaksana kebijakan memiliki horizon yang dibentuk oleh pengalaman belajar, budaya sekolah, keterbatasan sarana, dan kompetensi profesional. Proses implementasi yang terjadi berpotensi menemukan ketegangan diantaranya seperti maksud perancang kebijakan yang tidak tersampaikan dan realitas praktis di lapangan yang beragam. Jadi kurikulum ini juga sarat akan kepentingan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema politik memiliki koneksi langsung dengan kebijakan kurikulum. Setiap pergantian rezim pemerintahan hampir selalu diikuti oleh perubahan arah kebijakan kurikulum. Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *fusion of horizons* (peleburan cakrawala) dalam hermeneutika Gadamer. Setiap pemerintahan baru membawa horizon pemahaman yang berbeda mengenai makna pendidikan, tujuan pembelajaran, dan orientasi pengembangan peserta didik.

Akibatnya, kurikulum seringkali menjadi arena negosiasi politik antara kepentingan ideologis pemerintah dengan kebutuhan pedagogis di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Tilaar dalam Subkhan yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia kerap kali bersifat politis dan kurang berakar pada kajian filosofis yang mendalam (Edi, 2018). Kurikulum lebih sering diposisikan sebagai instrumen legitimasi kebijakan daripada sebagai refleksi filosofis tentang hakikat pendidikan. Hal tersebut dapat dipahami dalam perspektif Gadamer sebagai bentuk “prasangka institusional” yang mendahului proses pemahaman kurikulum.

Selain faktor politik domestik, penelitian juga menemukan bahwa tekanan global – khususnya standar internasional seperti PISA dan OECD – menjadi faktor determinan dalam dinamika kebijakan kurikulum. Di dalam analisis terhadap dimensi pembelajaran (D6) terlihat bahwa kebijakan pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh tuntutan peningkatan skor PISA dan indikator global lainnya. Menurut Gadamer, proses memahami selalu melibatkan “teks” dengan “konteks”. Dialog ini idealnya bersifat reflektif dan kritis namun dalam kenyataannya tekanan PISA sering kali diterima secara normatif tanpa melalui refleksi filosofis yang memadai.

Akibatnya terjadi beberapa ketegangan mendasar seperti: kurikulum yang lebih diarahkan untuk mengejar indikator terukur dibandingkan membangun makna belajar yang autentik, pendidikan dasar yang seharusnya bersifat holistik direduksi menjadi pencapaian kompetensi literasi-numerasi semata, praktik pembelajaran menjadi semakin teknokratis dan kehilangan dimensi humanistiknya. Pandangan ini sejalan dengan kritik Biesta dalam Dekker dan Meeter yang menegaskan bahwa dominasi standar global dalam pendidikan telah menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan manusia utuh menjadi sekadar produksi capaian kinerja (Dekker & Meeter, 2022). Kerangka hermeneutika Gadamer menyebut fenomena ini sebagai indikasi adanya kegagalan dialog antara tradisi pendidikan nasional dengan tuntutan global. Standar internasional diperlakukan sebagai kebenaran objektif bukan sebagai salah satu horizon yang perlu ditafsirkan secara kritis.

Temuan penelitian pada dimensi pembelajaran (D6) memperlihatkan bahwa kebijakan kurikulum yang sangat dipengaruhi politik dan standar global akhirnya berdampak langsung pada praktik pembelajaran di kelas. Guru sebagai pelaksana kurikulum berada dalam posisi hermeneutik yang kompleks di satu sisi harus mengikuti teks kebijakan resmi sedangkan di sisi lain harus menafsirkan kebijakan tersebut sesuai konteks peserta didik. Menurut Gadamer, pemahaman sejati terjadi ketika dialog antara teks dan penafsir berlangsung namun dalam realitas pendidikan Indonesia, ruang dialog tersebut sering kali menyempit akibat tekanan administratif dan target kinerja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya apa yang disebut Freire dalam Chalaune sebagai praktik pendidikan yang semakin bersifat “perbankan” (Chalaune, 2021), dimana pembelajaran lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap standar daripada proses pemaknaan kritis mulai terjadi di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika kebijakan kurikulum pendidikan dasar di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan administratif pada level dokumen formal. Kurikulum sebagaimana teridentifikasi dalam temuan penelitian bukan hanya teks normatif berupa standar isi, capaian pembelajaran, atau perangkat pembelajaran melainkan sebuah praksis yang memperoleh makna melalui proses interpretasi dalam ruang kelas. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa implementasi kurikulum tidak berhenti pada tahap regulasi tetapi berlanjut pada bagaimana guru memaknai, menafsirkan, dan mengaplikasikannya dalam praktik pedagogi sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan Pinar dalam Martín-Alonso dan kawan-kawan menegaskan bahwa kurikulum adalah pengalaman hidup yang dikonstruksi bukan sekadar dokumen teknis (Martín-Alonso et al., 2021).

Berdasarkan hasil analisis data pada kategori D5 (Kurikulum Merdeka) dan D6 (Pembelajaran Mendalam) ditemukan adanya hubungan signifikan dengan kategori “peran guru”.

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi kurikulum yang terjadi dalam kebijakan Merdeka Belajar menempatkan guru pada posisi strategis sebagai aktor utama implementasi kurikulum. Jika melihat kurikulum-kurikulum sebelumnya, guru cenderung diposisikan sebagai pelaksana teknis dari perangkat yang telah disusun secara sentralistik. Hal ini mengindikasikan terjadinya rekonstruksi peran guru dari sekadar *curriculum deliverer* menjadi *curriculum interpreter*.

Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru masih dihadapkan pada tuntutan standar penilaian yang relatif kaku. Disinilah muncul ketegangan hermeneutik antara semangat Merdeka Belajar yang menekankan kebebasan pedagogis dengan sistem birokrasi pendidikan yang tetap berorientasi pada standarisasi. Ditinjau dari perspektif hermeneutik kritis, situasi tersebut mencerminkan adanya dominasi logika teknokratis dalam kebijakan pendidikan (Kruszelnicki, 2025). Pendidikan dipahami sebagai sistem yang harus terukur, terstandar, dan dapat dikontrol, sehingga ruang interpretasi guru seringkali dibatasi oleh instrumen birokratis.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya koneksi yang kuat antara Kurikulum Merdeka dengan Standar Penilaian. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kurikulum baru membawa narasi filosofis tentang kemerdekaan belajar, praktik evaluasinya masih sangat dipengaruhi oleh paradigma pengukuran kuantitatif. Secara hermeneutik, penilaian pendidikan sejatinya merupakan proses pemaknaan terhadap perkembangan peserta didik. Namun, dalam praktik kebijakan penilaian sering direduksi menjadi angka, rubrik dan indikator performatif.

Gadamer dalam Prasetyono mengingatkan bahwa tidak semua aspek kemanusiaan dapat dipahami melalui rasionalitas teknis-instrumental (Prasetyono, 2024). Upaya melakukan kuantifikasi terhadap kualitas filosofis pendidikan menimbulkan persoalan mendasar yaitu bagaimana mungkin proses pembentukan karakter, kreativitas, kemandirian, dan daya kritis dapat sepenuhnya diukur dengan instrument standar? Dilema ini memperlihatkan sesuatu yang disebut Kementerian Pendidikan sebagai paradoks implementasi Merdeka Belajar yaitu kebebasan pedagogis di satu sisi tetapi kontrol evaluatif yang ketat di sisi lain. Temuan penelitian ini memperkuat kritik Apple dalam Uljens dan Ylimaki bahwa kebijakan kurikulum modern seringkali terjebak dalam logika akuntabilitas yang berlebihan sehingga mengabaikan dimensi humanistik pendidikan (Uljens & Ylimaki, 2017).

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis hermeneutika Gadamer terhadap dinamika kebijakan kurikulum pendidikan dasar (1994-2025) dan sintesis kerangka pikir yang telah dibangun, penelitian ini menyimpulkan empat poin utama yang saling koheren diantaranya adalah: pergeseran ontologis landasan filosofis, dominasi “prasangka” (*prejudice*) faktor eksternal, kesenjangan hermeneutik di tingkat pedagogis, rekonstruksi kebijakan melalui *policy brief*. Dinamika kurikulum dari tahun 1994 hingga 2025 menunjukkan pergeseran horizon filosofis yang tidak linear, terjadi transformasi dari pendekatan Esensialisme (penguasaan materi di kurikulum 1994) menuju Pragmatisme-Progresif (berbasis kompetensi dan pasar pada tahun 2004 dan 2006) kini berupaya kembali ke Humanisme-Eksistensial melalui Kurikulum Merdeka. Namun, dalam dialektika ini posisi filsafat Pancasila mengalami ambiguitas karena hadir secara normatif dalam setiap dokumen namun secara substantif sering tereduksi hanya sebagai label legitimasi politik daripada menjadi meta-filosofi yang menjwai setiap kompetensi.

Dua kekuatan besar yang menjadi “prasangka” dalam penentuan kebijakan adalah intervensi politik (pergantian rezim) dan tekanan standar global (PISA/OECD). Hal ini mengakibatkan kebijakan kurikulum sering bersifat reaktif terhadap tren Internasional (mengejar skor PISA) sehingga memutus dialog dengan akar tradisi pendidikan nasional, menciptakan diskontinuitas filosofis yang membingungkan praktisi pendidikan. Faktor eksternal ini menunjukkan kegagalan dalam merancang peta jalan pendidikan nasional sehingga menimbulkan inkompetensi dalam hasil yang diperoleh.

Penelitian ini menyarankan agar para pemangku kebijakan melahirkan sebuah produk berupa *Policy Brief* yang merekomendasikan penguatan kembali Pancasila sebagai Landasan Ontologis Statis (yang menjaga jati diri bangsa) sekaligus sebagai Landasan Epistemologis Dinamis

(yang terbuka terhadap kompetensi global). Kebijakan masa depan tidak boleh lagi mempertentangkan antara karakter lokal dan kompetensi global melainkan menyatukannya dalam satu tarikan napas kebijakan yang konsisten dan independen dari guncangan pergantian rezim politik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kualitas pendidikan yang baik dapat diperoleh dari keseimbangan serta konsistensi nilai-nilai filosofis bangsa dijaga dari intervensi politik dalam menetapkan kurikulum nasional pendidikan dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamduddin. (2016). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1, 43. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika Perubahan Kurikulum Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 PAUD](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika%20Perubahan%20Kurikulum%20Kebijakan%20Perubahan%20Kurikulum%202013%20PAUD)
- Ashidiqi, M. H., Ridlo, U., & Maswani. (2024). Kebijakan, Tujuan, dan Visi Pendidikan Nasional dalam Upaya Memajukan Pendidikan di Indonesia. *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(3), 454–474.
- Chalaune, B. S. (2021). *PAULO FREIRE 'S CRITICAL PEDAGOGY IN EDUCATIONAL TRANS-*. 9(April), 185–194. <https://doi.org/10.7821/granthaalayah.v9.i4.2021.3813>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Research Method*. 167–186.
- Dekker, I., & Meeter, M. (2022). Evidence-based education: Objections and future directions. *Frontiers in Education*, 7(August), 1–9. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.941410>
- Edi, S. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1(4), 151–160. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.26>
- Herman, H., Lukman Panji, A., & Eka Mahmud, M. (2023). Kebijakan Perubahan Kurikulum Di Indonesia. *An-Nadzir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(02), 92–104. <https://doi.org/10.55799/annadzir.v1i02.255>
- Kartimi. (2021). Landasan Pendidikan Sains. *Nucl. Phys.*, 13(1), 1–243.
- Kruszelnicki, W. (2025). Critical Pedagogy Between Modern Commitments and Poststructuralist Challenges in Contemporary Education. *Studies in Philosophy and Education*. <https://doi.org/10.1007/s11217-025-10026-3>
- Martín-Alonso, D., Sierra, E., & Blanco, N. (2021). Relationships and tensions between the curricular program and the lived curriculum. A narrative research. *Teaching and Teacher Education*, 105, 103433. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103433>
- Prasetyono, E. (2024). *Horizon Hermeneutika*. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GSn7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=si noptik+sejarah+agama+filsafat&ots=-luqgyBE0L&sig=W6HyIks80ogRO5GOVQIMvXf81nA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GSn7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=si%20noptik%20sejarah%20agama%20filsafat&ots=-luqgyBE0L&sig=W6HyIks80ogRO5GOVQIMvXf81nA)
- RI, D. (1993). *Kurikulum-1994.pdf*.

- Saputri, D. R., Pratiwi, T. R., Palupi, L. A., Pratiwi, I. I., Purwandari, D. R., & Masturi, M. (2023). *Filosofi Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Profesi Guru*. *Prosiding Seminar Nasional Fisika*, 35, 346–360.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 33(1), 1–12.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i1.27>
- Sujarwoto. (2020). *Dinamika Konsep Kebijakan Publik*. 6.
- Uljens, M., & Ylimaki, R. M. (2017). Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik. In *Educational Governance Research* (Vol. 5). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-58650-2\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-58650-2_11)